

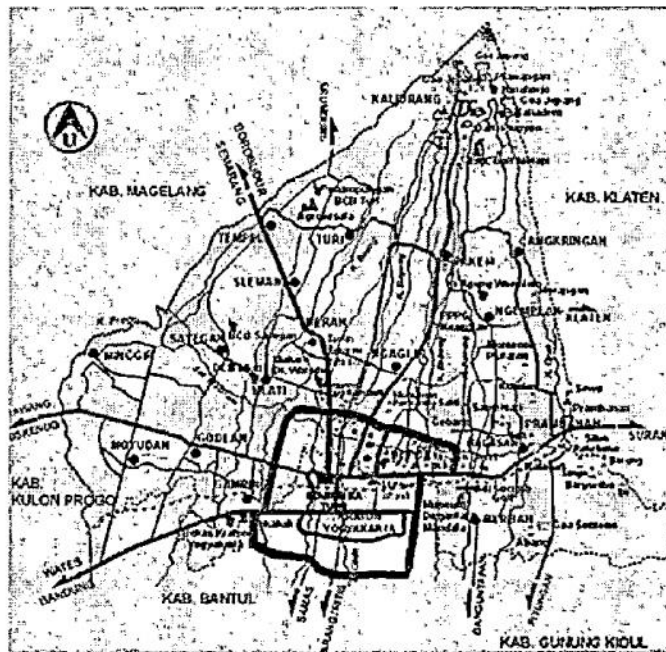
BAB II

Deskripsi Objek Penelitian

A. Kondisi Kabupaten Sleman

1. Peta Kabupaten Sleman

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Sleman



a. Slogan Pembangunan Desa Terpadu (Sleman Sembada)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, diperlukan suatu acuan untuk memotivasi dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut Kabupaten Sleman pada tanggal 2 Maret 1991 mencanangkan slogan gerakan pembangunan desa terpadu SLEMAN SEMBADA. Dasar hukum, landasan kekuatan slogan tersebut adalah Perda No 4 Tahun 1992 tentang Slogan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu SLEMAN SEMBADA. Gerakan pembangunan desa terpadu SLEMAN SEMBADA merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat Sleman dengan kekuatan sendiri. Artinya, hasil-hasil dari dinamika tersebut diharapkan dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk kepentingan

masyarakat. Tak dapat dipungkiri, SLEMAN SEMBADA merupakan slogan baru. Akan tetapi nilai-nilai yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang baru karena slogan tersebut merupakan kristalisasi dan formulasi dari nilai-nilai budaya dan kehidupan keseharian masyarakat Sleman.

b. Makna Dan Tujuannya

Kata SEMBADA memiliki makna utuh sebagai sikap dan perilaku rela berkorban dan bertanggungjawab untuk menjawab dan mengatasi segala masalah, tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam, untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kata SEMBADA merupakan sikap yang SEMBADA (Bahasa Jawa) yang merupakan kepribadian pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, menepati janji, taat azas dan bertekad bulat. Secara harafiah Slogan SLEMAN SEMBADA diartikan sebagai kondisi:

S : Sehat

E : Elok dan Edi

M : Makmur dan Merata

B : Bersih dan Berbudaya

A : Aman dan Adil

D : Damai dan Dinamis

A : Agamis

Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menciptakan Dati II Sleman yang Sejahtera, LEstari dan MANDiri. Ujung tombak gerakan slogan SLEMAN SEMBADA berada di tingkat dusun, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja LKMD bersama tokoh masyarakat dan semua lembaga masyarakat yang di tingkat dusun. Sedangkan pelaksanaan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten pada hakekatnya merupakan

pendukung pelaksanaan slogan SLEMAN SEMBADA di tingkat dusun. Dalam kehidupan sehari-hari, Slogan SLEMAN SEMBADA diharapkan mewujudkan dalam: pembangunan berwawasan lingkungan, budaya hidup bersih dan sehat, memberikan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Sleman yang bersih dan sehat.

2. Letak Dan Luas Wilayah

a. Letak Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km2)
		Desa	Dusun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1,479

Sumber : slemankab.go.id

3. Karakteristik Wilayah

1. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya.

b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih.

c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.

d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

2. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

3. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.

b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.

c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

4. Topografi

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

a. Ketinggian

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian < 100 m, 100 – 499 m, 500 – 999 m dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian > 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian

> 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

b. Kemiringan Lahan (Lereng)

Dari Peta topografi skala 1 : 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak horisontal untuk menghitung kemiringan (Lereng). Hasil analisa peta yang berupa data kemiringan lahan dogolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu lereng 0 – 2 %; > 2 – 15 %; > 15 – 40 %; dan > 40 %. Kemiringan 0 – 2 % terdapat di 15 (lima belas) Kecamatan meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 % dari seluruh wilayah lereng, > 2 – 15 % terdapat di 13 (tiga belas) Kecamatan dengan luas lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah. Kemiringan lahan > 15 – 40 % terdapat di 12 (dua belas) Kecamatan luas lereng ini sebesar 3.546 ha atau 6,17 % , lereng > 40 % terdapat di Kecamatan Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas 1.616 ha atau 2,81 %.

c. Iklim

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan Mei – Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan maret, namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan februari sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari. Adapun kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan agustus sebesar 74 % dan tertinggi pada bulan maret dan nopember masing-masing sebesar 87 %, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajat celcius pada bulan januari dan nopember dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajat celcius pada bulan september .

d. Tata Guna

Tanah Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis dibagian barat dan selatan. Keadaan jenis tanahnya dibedakan atas sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lain-lain. Perkembangan penggunaan tanah selama

5 tahun terakhir menunjukkan jenis tanah Sawah turun rata-rata per tahun sebesar 0,96 %, Tegalan naik 0,82 %, Pekarangan naik 0,31 %, dan lain-lain turun 1,57 %.

5. Kelembagaan

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sesuai dengan

Peraturan Daerah No.9 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

No	Nama Instansi
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
10	Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
12	Dinas Pasar
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14	Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
15	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Badan Kepegawaian Daerah
18	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Bangsa dan Penanggulangan Bencana
20	Inspektorat Kabupaten
21	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman
22	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan
23	Kantor Lingkungan Hidup
24	Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal
25	Kantor Pelayanan Perizinan
26	Kantor Perpustakaan Daerah
27	Kantor Arsip Daerah
28	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
30	Kecamatan

Sumber : slemankab.go.id

B. Profil PNPM Mandiri

1. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

- a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah:

Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Sejarah PNPM Mandiri

a. Pra Kondisi

1. Pada Bulan Agustus – Desember 2006 : Pemerintah mendapatkan tekanan yang berat dari publik yang mengatakan Presiden telah berbohong dengan menyatakan angka kemiskinan turun, yang dikutip dari naskah Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2005 dan menuduh pemerintah sengaja menyembunyikan angka kemiskinan terbaru dari BPS.
2. Presiden melakukan serangkaian Sidang Kabinet dan meminta untuk mengumumkan angka kemiskinan terbaru dari BPS pada Bulan Oktober 2006.

3. Tanggal 15 Desember 2006, Presiden menegaskan agar data dasar kemiskinan adalah dengan menggunakan angka yang dikeluarkan BPS dan semua kementerian/lembaga dilarang untuk melakukan survei sendiri-sendiri untuk menghindari perbedaan angka statistik mengenai kemiskinan.
- Menko Kesra pada waktu itu dijabat oleh Bapak Aburizal Bakrie menegaskan lebih lanjut dengan menghentikan seluruh proyek dan kegiatan survei yang akan dilakukan oleh K/L untuk Tahun Anggaran 2007 sebesar 850 milyar rupiah di 11 K/L.

b. Kronologis Pembentukan PNPB Mandiri :

1. Tanggal 23 Mei 2006 : Rapat antara Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas beserta staf terkait memutuskan untuk melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang mendekati closing date dalam pendanaannya melalui pinjaman Bank Dunia, namun perlu diintegrasikan dalam suatu Wadah Program Nasional dan akan di-scale up ke seluruh desa dan kecamatan miskin.
2. Pada rapat tanggal 23 Mei 2006 tersebut tercapai kesepakatan di antara Menko dan Menteri terkait, bahwa Menko Perekonomian yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Boediono akan berkonsentrasi untuk menjaga kestabilan makro ekonomi dan Menko Kesra (Bapak Aburizal Bakrie) sepakat untuk mengkoordinasikan program-program yang sifatnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua K/L termasuk yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan.
3. Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006 khusus untuk Penanggulangan Kemiskinan: Presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan

penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat.

4. Tim yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra bersama Deputi Bidang kemiskinan, UKM dan Ketenaga kerjaan Bappenas, Ditjen PMD, Depdagri, Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum bekerja keras menggarap konsep, nama dan disain awal program nasional pemberdayaan masyarakat ini dan sepakat mengajukan nama program sebagai “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
5. 12 September 2006 : Menko Kesra, Menko Perekonomian Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan menteri-menteri terkait menyetujui untuk menetapkan “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)” sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.
6. Menko Kesra menindak lanjuti mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mendagri minta Gub, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM pada TA 2007.
7. Tanggal 14 September 2006 Presiden RI menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM-Mandiri.
8. Logo PNPM Mandiri yang sekarang digunakan diciptakan oleh Tim yang dipimpin oleh Direktur Kemiskinan Bappenas pada saat itu dan pada rapat Tim Pelaksana PNPM Mandiri yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemenko Kesra ditetapkan sebagai Logo Resmi PNPM Mandiri.

9. Pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pada saat diluncurkan PNPM Mandiri terdiri dari : PNPM Mandiri Perdesaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri dan PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan penyempurnaan dari Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum.
11. Pada Tahun 2008, pada PNPM Mandiri ditambahkan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat , sehingga PNPM Mandiri selain PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan ditambah dengan beberapa program lainnya :
 - a. PNPM-P2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal, dikelola oleh Kementerian PDT, mendapat pinjaman dari Bank Dunia.
 - b. PNPM- PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) yang pada tahun 2009 menjadi RIS-PNPM (Rural Infrastructure Services), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, dengan pinjaman dari ADB.
 - c. PNPM-PISEW/RISE (Program Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah/Rural Infrastructure for Social and Economic Activities), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, dan Bappenas, dengan pinjaman dari JICA/JBIC.

c. Ke-5 program dalam PNPM Mandiri ini merupakan Program Inti (Core) artinya Program yang membangun Sistem, proses dan prosedur serta wadah bagi pemberdayaan masyarakat di setiap desa.

Sejak Tahun 2008, maka dikembangkan pula PNPM yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya open menu namun sudah terfokus pada sektor tertentu, yaitu :

1. PNPM PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan), dikelola oleh Kementerian Pertanian.
2. PNPM-KP (Kelautan dan Perikanan), dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. PNPM – Pariwisata, dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
4. PNPM-Permukiman, dikelola oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Selain itu juga dikembangkan skema-skema PNPM yang sifatnya terfokus pada kelompok sasaran tertentu dan ditambahkan (on-top) pada PNPM inti yang dikelola oleh K/L pengelolanya, yaitu :

1. PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPM untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan anak dan pendidikan keluarga) dikelola oleh Ditjen. PMD, Kemendagri, mendapat bantuan hibah dari Ausaid/PSF.
2. PNPM Hijau (Green KDP), ditambahkan pada lokasi PNPM Perdesaan, dikelola oleh Ditjen. PMD, Depdagri, mendapat pendanaan dari Multidonor PNPM Support Facility (PSF).
3. PNPM-Peduli, PNPM yang diperuntukkan bagi Kelompok masyarakat rentan (korban trafficking, PSK, transgender, anak yatim, para janda kepala keluarga, penyandang cacat, KAT, penderita HIV/AIDS, penderita Lepra, pecandu narkoba, kelompok

marginal lainnya), dikelola oleh LSM yang diseleksi, mendapat pendanaan dari Multidonor PSF.

3. Komponen Program PNPM Mandiri

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

- a. Pengembangan Masyarakat, Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.
- b. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
- c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang

kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

- d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

4. Pendekatan Program

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

- a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan.

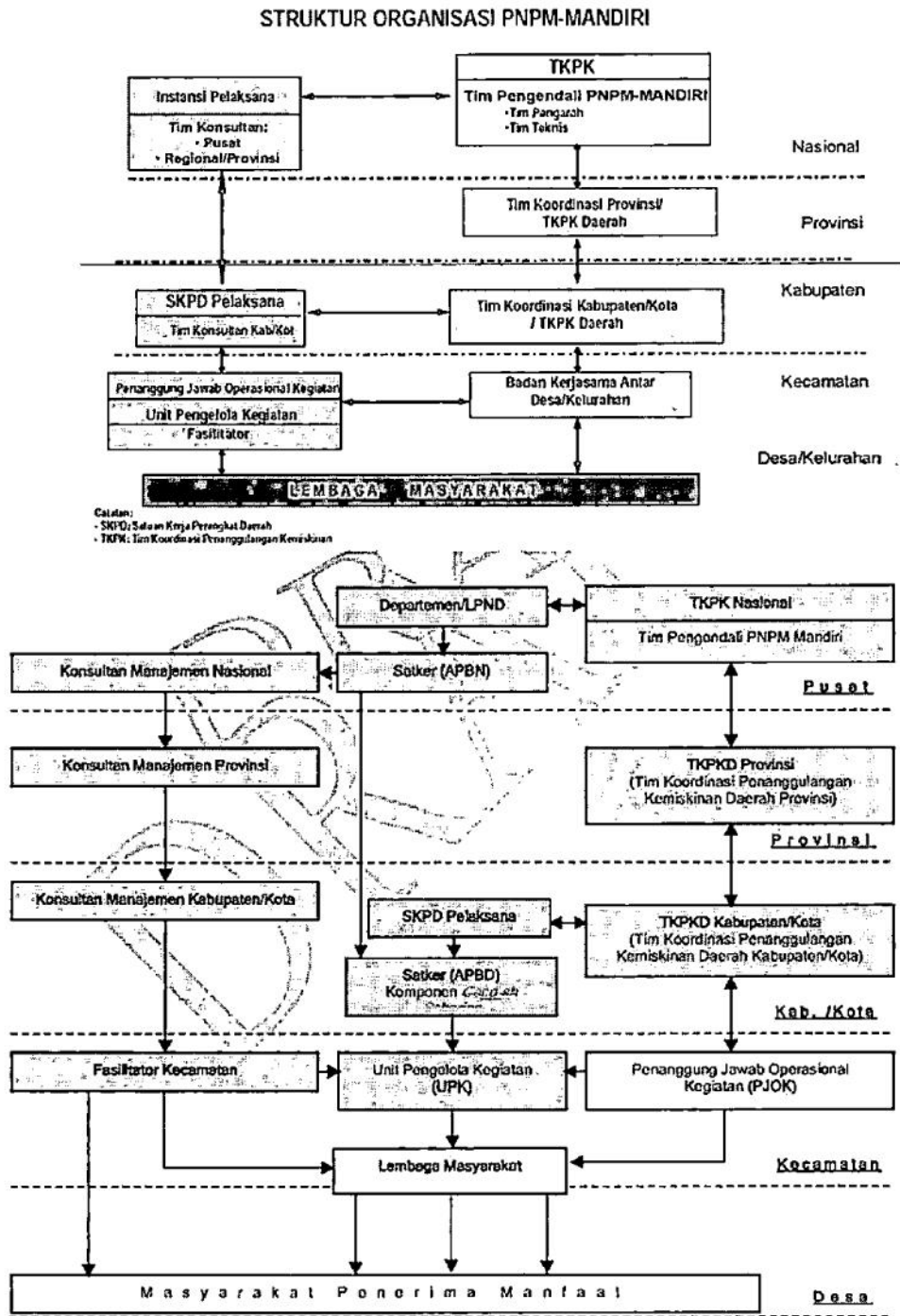
5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan PNPM-MANDIRI pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi :

- a. Penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
- b. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

6. Organisasi Pengelolah Program

Gambar 2.2



Sumber: <http://www.pnpb-mandiri.org>

6. Logo

Gambar 2.3



Sumber: <http://www.pnpm-mandiri.org>

C. Tentang PNPM Mandiri Pariwisata

Kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata mengacu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Berikut adalah sekilas tentang PNPM Mandiri Pariwisata seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata:

1. Pengertian Umum

Bagian dari PNPM Mandiri yang pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan pemberian bantuan langsung masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan kepariwisataan di desa wisata.

2. Tujuan Program

- (1) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, dan keswadayaan setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya melalui usaha kepariwisataan;
- (2) Meningkatkan kemampuan kreatifitas masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial dan budaya serta kearifan lokal untuk memberdayakan dirinya sendiri;
- (3) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat;
- (4) Membangun kemitraan lintas sektor untuk melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan di wilayah binaan.

3. Indikator Keberhasilan

- (1) Masyarakat memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata;
- (2) LKM mampu merumuskan secara partisipatif dokumen perencanaan desa yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata;
- (3) Pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana Bantuan Desa Wisata (BDW) secara transparan dan akuntabel serta diprioritaskan kepada kelompok miskin yang bergerak di sektor pariwisata;
- (4) Pemerintah daerah telah menyusun kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin;
- (5) Meningkatnya jumlah kunjungan, lama tinggal dan jumlah pembelanjaan wisatawan pada DTW

(6) Terbukanya lapangan kerja dan usaha di desa wisata.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa PNPM Mandiri Pariwisata mengacu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Untuk melengkapi pedoman tersebut, diperlukan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2011. PTO ini mengatur antara lain tentang persiapan, pelaksanaan siklus kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, pemantauan, pengawasan, pengaduan, evaluasi, dan sanksi yang dijadikan landasan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata oleh para pemangku kepentingan.

A. Deskripsi Desa wisata Brayut dan Desa Wisata Pajangan

1. Desa Wisata Brayut

a. Letak Geografis Desa Wisata Brayut

Desa Brayu terletak di kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu Tempu Dari Desa Brayu ke Ibu Kota Kecamatan ialah 20 Menit dan ke Ibu Kota Kabupaten adalah 10 menit, sedangkan jarak dari Desa Brayu ke Ibu Kota Kecamatan adalah 5km dan ke Ibu Kota Kabupaten 1,5km.

b. Sejarah Desa Wisata Brayut

Pada jaman Belanda, Desa Berayut menjadi markas tentara rakyat, hampir semua pemuda Desa Berayut menjadi anggota tentara rakyat. pada hari jumat 11 febuari1949 terjadi peristiwa 2nd clash oleh belanda yang mengakibatkan kontak senjata. Terjadi perlawanan yang tidak seimbang pada saat itu, Desa Brayut diserbu dari empat penjuru dengan maksud untuk membumi hanguskan dan menumpas tentara rakyat. oleh karna ada serangan dari tentara belanda, para pemuda beserta warga Desa Brayut pada saat itu mencari tempat persembuyan. Kebetulan di sebelah selatan Desa terdapat lorong yang dahulunya bekas

tempat pembuangan limbah pabrik pewarna kain (medel). Sekitar 60 pemuda dan warga desa memanfaatkan lorong ini sebagai tempat persembuyian.

Ini yang menyelamatkan warga, terutama pemuda brayut pada saat itu, dan untuk mengenang Palawan yang telah gugur maka disebelah selatan desa didirikan monument pahlawa. Dampak dari peristiwa tersebut,Desa Brayut sering sekali ditemukan sisa-sisa amunisi berupa peluru (300 butir), selangsang, dan di sungai mengalir desa ditemukan Bom seberat 21 kg dan geranat nanas yang kemudian diserakan kepada pihak yang berwajib.

c. Keadaan Demografis Desa wisata Brayut

Menurut Monografi Desa Brayut Tahun 2010:

1. 212 orang berjenis kelamin laki-laki dan 199 orang berjenis kelamin perempuan
2. Jumlah penduduk menurut agama terdapat 374 orang beragama islam dan 37 orang beragama khatolik.
3. Pesebaran penduduk menurut mata pencarian bisa dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.2

Persebaran Penduduk Menurut Mata Pencarian

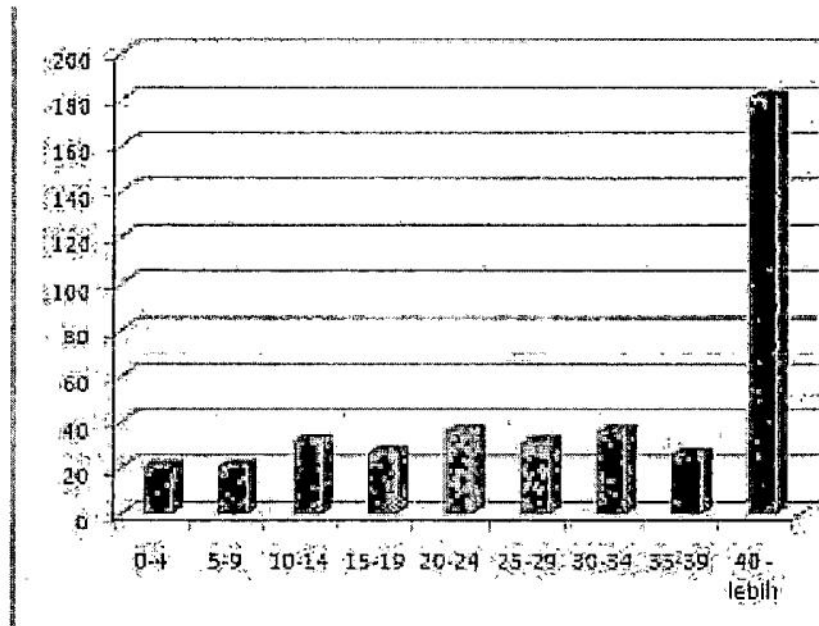
No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani: a. Petani Pemilik Tanah b. Petani Pengarab Tanah c. Buru Tani	30 Orang 31 Orang 39 Orang
2	Pengusaha Sedang/Besar	1 Orang
3	Pengrajin/Industri Kecil	1 Orang
4	Buruh Industri	13 Orang
5	Buruh Bagunan	15 Orang
6	Pedagang	6 Orang
7	Pegawai Negeri sipil	17 Orang
8	TNI	2 Orang
9	Pensiunan TNI/PNS	6 Orang
10	Peternak: a. Sapi biasa b. Ayam c. Itik	36 Orang (85 ekor) 70 orang (350 ekor) 2 Orang (30 ekor)

4. Persebaran Penduduk Berdasarkan Usia

Persebaran Penduduk di desa Brayut Berdasarkan Usia dapat dilihat pada table berikut ini:

Grafik 2.1

Persebaran Penduduk Berdasarkan Usia



Sumber : Monografi Desa Wisata Brayut bulan Maret 2010

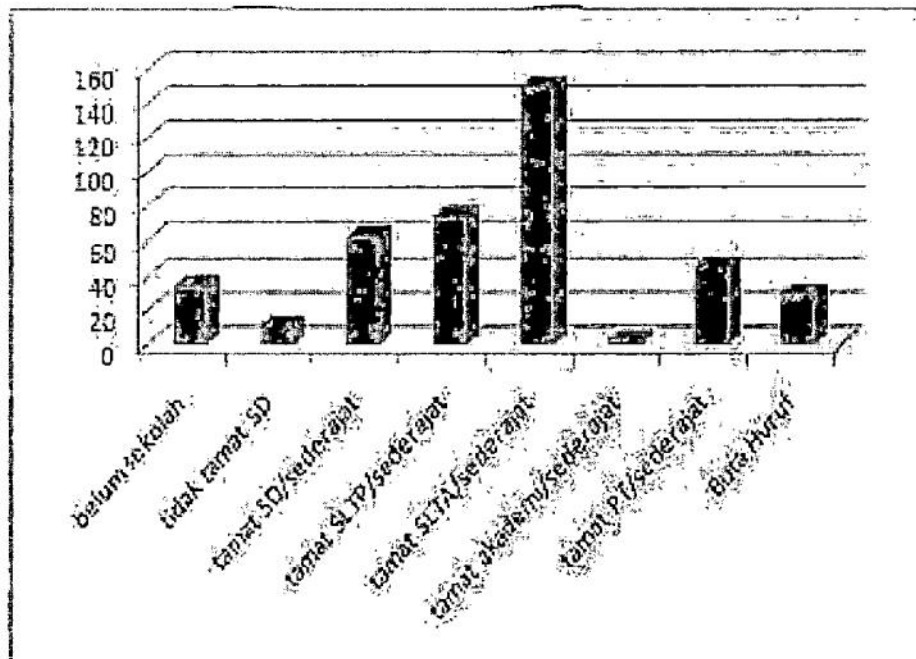
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa penduduk Wisata Brayut didominasi oleh penduduk dengan usia 40 tahun lebih, sedangkan persebaran penduduk usia dewasa, remaja, dan anak-anak di Desa Brayut tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu banyak. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Brayut kurang seimbang antara penduduk yang berusia 40 tahun lebih dengan penduduk yang berusia dibawah 40 tahun.

5. Persebaran Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Persebaran penduduk Desa Wisata Brayut berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini:

Graffik 2.2

Persebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumbr: Monografi Desa Wisata Brayut bulan Maret 2010

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Desa Wisata Brayut mayoritas adalah tamatan SLTA/Sederajat, kemudian tamatan SLTP/Sederajat, tamatan SD/Sederajat, dan tamatan tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi/Sederajat. Sehingga desa Wisata Brayut ini masih memerlukan banyak sumber daya manusia yang berkompetendi bidang masing-masing untuk kemajuan desa.

d. Potensi Desa Wisata Brayut

Wilayah Desa Wisata Brayut merupakan dataran dengan ketinggian rata-rata 243 M di atas permukaan laut, dan keadaan suhu berkisar antara 20-35 derajat Celsius. Dengan kondisi

topografi tersebut, Desa Wisata Brayut merupakan wilayah permukiman yang ideal. Kondisi tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi mendukung untuk menjadi lahan pertanian dengan berbagai macam tanaman. Kondisi ini juga sangat mendukung peeliharaan berbagai hewan ternak. Keberhasilan pemanfaatan potensi alam yang sudah baik tidak bisa lepas dari dukungan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.

Desa Wisata Brayut memiliki potensi dan keunikan tersendiri dibandingkan Desa yang lain, lingkungan Desa masih merupakan lahan pertanian yang subur dan cukup luas berbagai macam jenis tanaman, buah-buahan dan sayur masih tersedia. Masyarakat Desa Brayut mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sistem pertanian masih sederhana sehingga pengolahan lahan pertanian masih dilakukan manual dengan menggunakan peralatan yang sederhana seperti membajak sawah dengan sapi, mencangkul, dan memetik padi, sedangkan peralatan mekanik belum menggeser kebiasaan menggarap sawah.

Pada musim panen padi nampak kegembiraan masyarakat yang berusaha mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Bentuk rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan melakukan ritual yang merupakan warisan nenek moyang dimana ritual tersebut dengan Wiwit (awal), Acara Wiwit merupakan kebiasaan masyarakat yang turun temurun dari nenek moyang. Peralatan yang digunakan untuk panen padi disebut ani-ani, tradisi panen dengan ani-ani inilah yang merupakan salah satu daya tarik Desa Wisata Brayut karena dapat memberikan sebuah gambaran kehidupan masyarakat desa yang masih kental mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional.

Berpijak pada kebiasaan panen padi dengan ani-ani inilah sebuah Swadaya Masyarakat tertarik untuk melestarikan filosofi kehidupan masyarakat dengan membentuk sebuah yayasan yang diberi nama yayasan ani-ani. Sebagian besar tanah produktif di Desa adalah lahan pertanian dengan luas 34.750 HA sedangkan 4 HA tanah perkarangan dan permukiman penduduk. Kondisi ekonomi masyarakat dan lingkungan tertata rapi dan bersih, rumah-rumah

di Desa Wisata Brayut pada umumnya berbentuk rumah sinim dan joglo. Rumah ini merupakan ciri khas rumah Jawa tempo dulu, dilihat dari banyaknya rumah joglo dan sinom. Desa ini merupakan bukti bahwa Desa Brayut sudah dihuni cukup lama. Sejarah membuktikan bahwa penduduk telah turun temurun melahirkan seorang Demang dan beberapa Lurah Desa sejak era Belanda.

a. Potensi Alam

1. Potensi Pertanian

Desa Brayut adalah salah satu wilayah di Kecamatan Sleman yang bercorak agraris. Sebagian besar penduduk mempunyai mata pencarian pokok sebagai Petani, Buruh Tani, serta Usaha Pertanian. Pertanian utama di sini ialah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang panjang, serta cabai. Luas kepemilikan lahan pertanian di Desa Brayut dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 2.3
Lahan Kepemilikan Tanah

No	Tanaman	Luas Tanah
1	Padi	38 Hektar
2	Jagung	15 Hektar
3	Kedelai	1 Hektar
4	Kacang Tanah	0,5 Hektar
5	Kacang Panjang	1 Hektar
6	Cabai	1 Hektar

Sumber: Profil Desa Wisata Brayut Bulan Maret 2010

2. Potensi Perkebunan

Selain kaya dengan potensi pertanian Desa Brayut juga mempunyai potensi hasil perkebunan dan buah-buahan. Komoditas perkebunan yang utama adalah Tembakau (1 Hektar) serta Kapas (175 batang/Hektar) dan Hasil tanaman Buah-buahan. Hasil buah-buahan dapat dilihat di table berikut ini:

Tabel 2.4
Hasil Tanaman Buah-Buahan

No	Tanaman Buah	Hasil
1	Jeruk	100 Batang/Ha, Hasil (0,5/Ha)
2	Rambutan	300 Btang/Ha, Hasil (0,5/Ha)
3	Pisang	350 Batang/Ha, Hasil (0,5/Ha)
4	Salak	5000 batang/Ha, Hasil (3,5/Ha)

Sumber: Profil Desa Brayut bulan Maret 2010

3. Potensi Perternak, Kelompok Ternak

Ternak yang diusahakan adalah ternak sapi, dengan orientasi usaha yaitu penjualan anak sapi. Kelompok ternak ini mengadakan pertemuan sebulan sekali setiap malam senin pahing, kelompok ternak ini berkembang sangat pesat dan telah mendapat berbagai perestasi. Haltersebut tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam pengembangan kelompok tani ini.

4. Budidaya Jamur Kering

Jamur ini dapat dipanen setiap 1 bulan, bekerjasama dengan pihak lain dalam pemasarannya dan tujuan pemasaran saat ini mmasih ke wilayah Wonosobo Jawa Tengah.

5. Potensi Budaya

- a. Kelompok Karawitan
- b. Sanggar Tari

e. Paket Wisata desa Wisata Brayut

Desa Wisata Brayut menawarkan paket Wisata kepada wisatawan yang berkunjung ke desa Brayut. Paket wisata ini mengajak wisatawan menginap dirumah-rumah penduduk dan mempraktekan langsung kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa, kegiatan tersebut iyalah mengelolah tanah pertanian secara tradisional (membajak swa dengan menggunakan lembu dan menggaris lahan tandur upacara tedun, matun dan memupuk tanaman padi), membuat

makanan khas Desa, belajar karawitanm belajar tari klasik tradisioal, belajar membuat, dan kegiatan-kegiatan Desa lainnya.

Paket wisata Desa Wisata Brayut antara lain dapat dilihat dalam table dibawa ini:

Tabel 2.5
Paket Wisata Desa Brayut

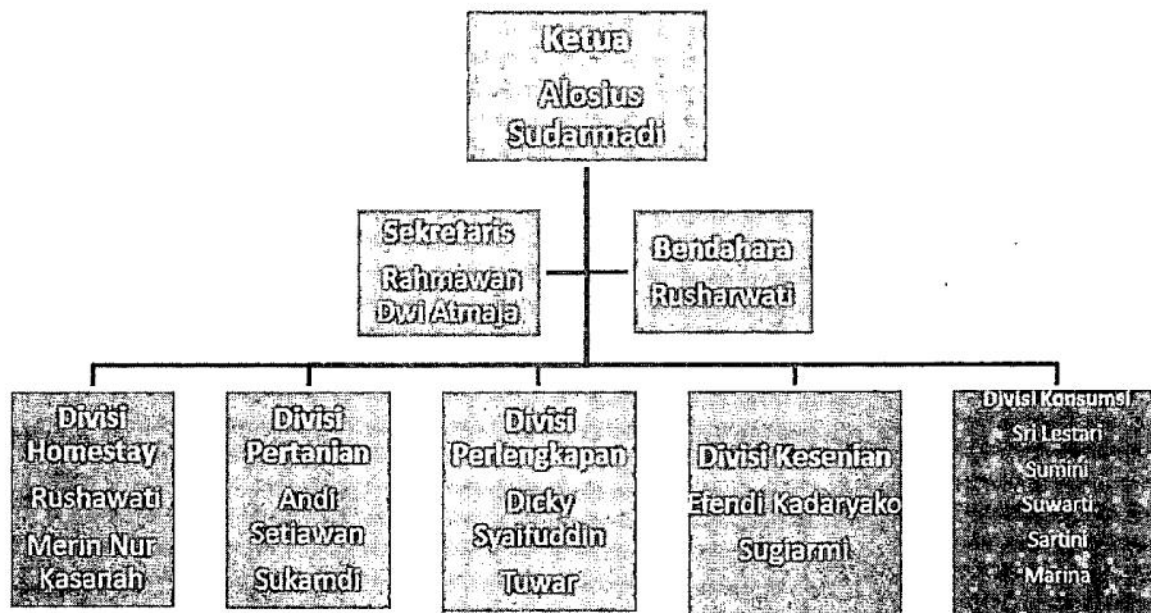
No	Paket Wisata	Harga
1	Kenduri	Rp. 15.000/Orang
2	Pelatihan Pertanian	Rp. 6.000 (Pagi)
3	Belajar Menari	Rp. 6.000 (Pagi/Siang)
4	Belajar Gamelan (Karawitan)	Rp. 6.000
5	Belajar Membuat	Rp. 20.000
6	Permainan Tradisional	Rp. 6.000
7	Paket Masakan Tradisional	Rp. 6.000
8	Sewa Ruang Pertemuan	Rp. 200.000
9	Atraksu Jathilan (Kuda Lumping)	Rp. 350.000

Sumber: Profil Desa Wisata Brayut bulan Maret 2010

f. Struktur Pengurus Desa Wisata Brayut

Bagan 2.1

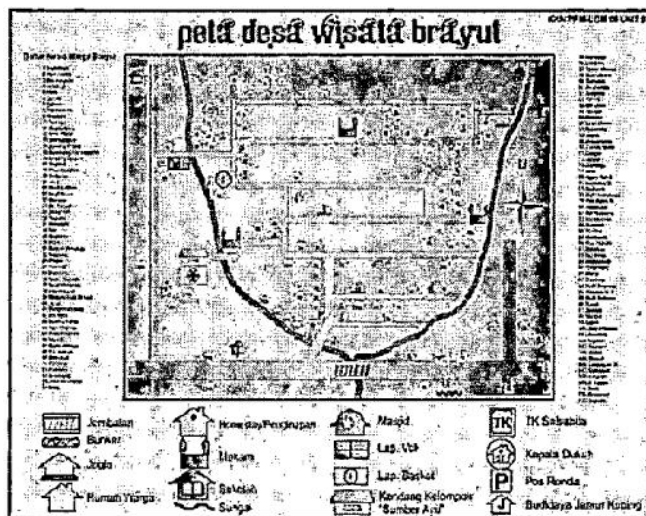
Struktur pengurus/organisasi Desa Wisata Brayut



Sumber: Diolah dari data pengurus Desa Wisata Brayut

g. Peta Desa Wisata Brayut

Gambar 2.3



2. Desa Wisata Pajangan

b. Geografis

Dusun Pajangan secara administratif merupakan bagian wilayah Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas 10,6425 Ha dihuni 165 KK sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sehingga 70 persen lahannya digunakan untuk lahan pertanian dan perikanan sedang sisanya dimanfaatkan untuk pemukiman. Batas wilayah :

1. sebelah Utara Dusun Karang Kepoh/Karang Tanjung
2. sebelah Timur dengan Dusun Tlacap
3. sebelah Selatan dengan Dusun Grojokan
4. sebelah Barat dengan sungai

c. Obyek dan Daya Tarik Wisata

1. Kesenian

- a. Kesenian Kethoprak "PS Bayu" yang dipimpin oleh Gito Gati
- b. Seni Pedhalangan dengan seniman dhalang muda berbakat antara lain:
Ki Edi Suwondo, Ki Edi Endarto, Ki Bayu Sugati dan Ki Suyadi
- c. Kesenian Campusari yaitu "Bimo Laras" dan "Wedo Tomo"
- d. Dagelan Mataram Gito Gati dengan seniman dagelan muda berbakat pula yaitu Bambang Rabies.

2. Upacara adat

- a. Nyadran Upacara adat bersih makam yang secara rutin telah dilaksanakan bahkan telah dikemas untuk menarik wisatawan baik domestik maupun manca negara dengan acara Kirab Prajurit, Gamelan, Tumpeng, Andong serta menampilkan kesenian Jathilan, Wayang dan Kethoprak. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Suro (Jawa)

b. Ruwatan Upacara Ruwatan dalam tradisi Jawa sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menghilangkan kesialan (sesuker) dengan sesaji khusus menampilkan Wayang Purwa (Kulit) semalam suntuk dan mandi kembang bagi yang diruwat. Kegiatan ini tergantung permintaan orang yang ingin diruwat.

c. Wiwit Pelarungan berkah atas panen oleh para petani kepada Dewi Sri dalam mitos Jawa dianggap sebagai Dewi Padi

d. Upacara Kenduri Upacara syukuran dengan menyajikan makanan khas Jawa antara lain : tumpeng, ambeng, golong, ingkung, gudhangan, jajan pasar dan lain sebagainya yang mempunyai makna sendiri-sendiri. Kenduri ini dipimpin oleh seorang Kaum (pimpinan upacara)

3. Atraksi wisata lainnya

Pementasan Wayang Kulit yaitu pementasan wayang yang terbuat dari kulit sapi dengan pemeran tunggal atau sutradara tunggal yang disebut sebagai Dhalang, dengan diiringi gamelan lengkap (alat instrument tradisional Jawa) yang dimainkan oleh kurang lebih 30 orang wiyogo (penabuh gamelan) dan beberapa pesinden/waranggono (pelantun lagu/gending Jawa). Cerita wayang pada umumnya tentang kisah Mahabarata dan Ramayana atau cerita carangan oleh para Dhalang itu sendiri agar lebih menarik.

c. Sarana Prasarana

1. Rumah Tradisional Limas, Joglo yang digunakan sebagai tempat latihan beberapa jenis kesenian

2. Home Stay sederhana yang dapat menampung wisatawan untuk berwisata dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dengan menu masakan tradisional khas masyarakat desa yang dapat disesuaikan dengan permintaan, dan paket makanan jamuan hajatan besar dapat dipesan untuk acara makan bersama

3. Sarana lain juga tersedia diantaranya lapangan olah raga, dan Mushola

d. Potensi Wisata

Dusun Pajangan memiliki tradisi budaya yang masih terpelihara dengan baik yaitu kesenian dan upacara daur hidup. Potensi kesenian berupa kesenian kethoprak "PS Bayu" yang dipimpin oleh Gito Gati, seni pedalangan, campursari dan dagelan Mataram Gito Gati. Sedangkan upacara daur hidup yang masih berkembang berupa nyadran, ruwatan, wiwit dan upacara kenduri.

e. Sarana Prasarana Wisata

Rumah tradisional Limas, Joglo yang digunakan sebagai tempat latihan beberapa jenis kesenian. Home stay dengan menu masakan tradisional khas masyarakat desa yang dapat disesuaikan dengan permintaan.

Seni Tari : Tari Jawa

Seni Gamelan : memberikan pelatihan keterampilan memainkan alat-alat musik tradisional Jawa seperti kendhang, bonang, siter, gong, saron, gambong, gender dan lain sebagainya.

Seni Olah Suara : mengajarkan olah suara/nembang untuk mengiringi gamelan dan wayang dengan tembang-tembang Jawa.

Seni Pedhalangan : mengajarkan wisatawan untuk memainkan wayang kulit dan mengerti alur cerita pewayangan secara umum serta mendalami seluk beluk pewayangan dan sejarahnya.

f. Pengurus Lembaga/Organisasi

Pengurus/kelembagaan desa wisata di Desa Wisata Pajangan sangat tidak jelas dan tidak dapat ditelusuri. Dari mulai observasi awal, peneliti sangat kesulitan mencari sebenarnya siapa pihak yang bertanggungjawab atas keberlangsungan Desa Wisata Pajangan.